

Seorang Pemuda Nekat Hadang Mobil Cabup Kolaka Saat Iring Irian

Kolaka, SultraNET. | (13/05/2018) Ada yang menarik saat iring-iringan kendaraan pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kolaka Asmani Arif dan Syahrul Beddu melintasi jl. Raya poros kolaka pomalaa, tampak warga sangat antusias menyaksikan jejeran kendaraan yang di prediksi ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Iring-iringan itu bakal menuju lapangan Pateda Pomalaa untuk berkampanye, bahkan tampak seorang pemuda nekat menghampiri dan berupaya bisa bersalaman dengan Dr. Asmani Arif, SE., ME yang berada didalam kendaraannya dan disambut tos oleh Calon Bupati Kolaka itu.

Imam Gunawan salah seorang pemuda yang antusias itu menuturkan bahwa kampanye pasangan yang bertagline BERANI kali ini nampak lebih buming dari kampanye kampanye sebelumnya.

“Hari ini terlihat banyak sekali pendukung” Tuturnya penuh semangat

Pakde Karwo : Jangan Takut, Terorisme Harus Dilawan

Surabaya, SultraNET. | Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta masyarakat untuk tidak takut terhadap terorisme, sebaliknya harus berani melawannya karena terorisme merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ini disela-

sela mengunjungi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) bom bunuh diri di gereja Jl. Arjuna Surabaya, Minggu (13/5) pukul 09.45 WIB.

Kunjungan dilakukan bersama-sama dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman.

Sebelumnya, juga dilakukan di TKP Ngagel dan Diponegoro.

“Polri dan TNI sebagai kekuatan inti bersama-sama masyarakat akan melakukannya,” ujar Pakde Karwo seraya menyampaikan rasa duka mendalamnya atas timbulnya korban jiwa dalam ledakan bom di tiga Gereja yang ada di Kota Surabaya itu.

Ditambahkan, dirinya bersama Forkompida akan memperkuat pengamanan di semua tempat.

Langkah yang sama juga dilakukan untuk deteksi dini dengan memperkuat tiga pilar, yakni kepala desa, bhabinkamtibmas, dan babinsa.

Disela-sela melihat penanganan korban ledakan bom bunuh diri ini, Gubernur memberikan arahan agar penanganan para korban dipusatkan di RSUD dr. Sutomo. Sampai dengan pukul 10.09 WIB, tercatat sebanyak enam korban masuk di RSUD dr. Sutomo, dengan satu diantaranya meninggal dunia.

Menjawab pertanyaan media, Kapolda Jatim Mahfud Arifin menyampaikan penanganan keamanan oleh aparat sudah dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Buktinya, polisi juga jadi korban,” ujarnya sambil menambahkan untuk lokasi Ngagel sudah dinyatakan clear.

Sementara, dua tempat lainnya, Arjuno dan Diponegoro, masih dilakukan pembersihan oleh kepolisian

(JNN/SENTRALONE)

3 BOM Guncang Kota Surabaya

Surabaya, SultraNET. | Tiga ledakan diduga bom terjadi di kota surabaya pagi ini. Ledakan pertama terjdin di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5/2018).

“Ledakan di sana. Sekitar jam 7,” kata Hendra, seorang petugas pagi ini.

Aparat sudah terjun ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung membenarkan kejadian ini.

Menurut Frans, jumlah korban meninggal dunia sementara ada tiga orang. “Satu orang merupakan pelaku, dan satu orang lagi dari jemaat,” kata Frans yang dikutip dari Kompas TV.

Frans juga mengabarkan, ada satu lagi ancaman bom di gereja GKI di Jalan Diponegoro. Frans menjanjikan untuk update informasi ini melalui media centre.

Informasi terakhir yang disampaikan kepada wartawan pada pukul 08.30, Frans menyebut lokasi ledakan bom terjadi di 3 lokasi yang sebelumnya disebutkan dua lokasi ledakan bom.

Hingga saat ini dikonfirmasi sudah 8 orang korban meninggal dunia dan 38 orang di rawat diberbagai rumah sakit di surabaya (JNN)

Motor Kosleting, SPBU Di Baruga

Hampir Ludes Terbakar

Kendari, SultraNET.| (13/5/2018) SPBU yang beroperasi Dilokasi Keluarahan Baruga-Lepo-Lepo hampir ludes terlalap sijago merah. Api yang hampir menghanguskan Pertamina tersebut bersumber dari motor yang tengah melakukan pengisian bahan bakar pertalite dan tiba-tiba muncul percikan api dari mesin motor hingga Bensin yang ada dalam tangki Motor memancing api makin membesar.

Inseden terjadi pada Sabtu (12/5/2018) sekitar pukul 15.00 waktu setempat dan berlangsung sangat cepat hingga membuat pengendara kendaraan lain yang tengah antrian berhamburan menghindari ancaman api itu.

Percikan Api yang Ditangki Motor langsung diatasi oleh Petugas Securiti dan pegawai pertamina.

Dalam konfirmasi Awak Media ini, hanya bisa berkomunikasi dengan pihak sekuriti dan pegawai pertamina karena pihak pimpinan (Direktur) tengah diluar kota.

Menurut Syam, Security yang berhasil mengatasi menjelaskan kronologi tersebut.

“Saat pelanggan lagi mengisi BBM pertalite, tiba-tiba dia keluar api dari mesin yang menyebabkan tangki motornya langsung menyala, untung saya langsung menutup kobaran api dengan Pembatas Lalu lintas yang kebetulan disamping motor itu dan berusaha menutup kobaran api yang makin besar yang keluar dari dalam tangki”, jelasnya.

Tambahnya, karena kondisi api tidak berhenti meski sudah ditutup rapat, motor yang tengah menyala itu ditendang hingga terlempar jauh dari tempat Pengisian.

“Karena apinya tidak mau mati padahal saya sudah tutup tangkinya maka saya langsung tendang itu motor dan karena motor masih posisi berdiri, ya motornya langsung jatuh jauh dari tempat pengisian”, tambahanya.

Karena kondisi masih sementara hujan, maka dengan tersiaram hujan dan usaha

lain dari masyarakat api berhasil dipadamkan dan suasana kembali berjalan normal.

Darurat Pelayanan Di Kel. Lameroro. Pemkab Seakan Lepas Kontrol

Rumbia, SultraNET. | Ada keunikan tersendiri dalam pelayanan Publik di Kelurahan Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana. Pasalnya, setiap warga yang hendak berurusan di instansi tersebut, warga terlebih dahulu wajib melalui jasa rental komputer untuk membuat format surat sesuai kebutuhan sebelum menemui Lurah untuk kebutuhan tandatangan .

Alasannya mengejutkan, salah satu kantor Kelurahan Ditengah Ibu kota Kab. Bombana ini, tidak memiliki fasilitas peralatan kantor yang dapat difungsikan untuk melayani Warganya.

Anehnya, instansi yang hanya berjarak Dua Ratusan meter dari Sekretariat Daerah ini, tidak memiliki fasilitas Instalasi jaringan Listrik seyogyanya kantor instansi pemerintahan.

Salah seorang warga Kel. Lameroro MS (inisial -Red), yang pernah berurusan administrasi dikantor kelurahan menuturkan dari pengalamannya, Ia sungguh menyesalkan kondisi itu masih terjadi dikantor pemerintah, menurutnya, ketika Warga hendak berurusan di kelurahan, seharusnya tidak perlu lagi direpotkan.

“Kan itu kantor pemerintah, sudah ada gajinya itu pegawai yang menulis, semua itu kertas tinta sudah ada anggarannya. Masa kita Pii lagi yg harus urus yang begituan?.” Cetusnya Kesal.

Informasi yang dihimpun awak media, pelayanan dikantor itu sudah berlangsung lama. Bermula Sejak Pemutusan Hubungan arus listrik dikantor itu oleh Pihak

PLN sebagai sanksi ketunggakan pembayaran tarif listrik secara terus menerus sesuai ketentuan aturan.

Lurah Lameroro, Suharno Wahid, yang coba dihubungi via selulernya (12/05/2018 20:00) belum bisa dikonfirmasi.

Padahal, disetiap momentum politik, oleh para calon kepala daerah. Janji Pelayanan Publik kerap jadi wacana utama yang menjadi bahan kelakar dalam menyampaikan Visi misi kampanye sebagai janji politik.

Meskipun demikian, tanpa ada janji politik pun, yang namanya pelayanan publik adalah wajib terpenuhi, terutama di era percepatan pembangunan Kab. Bombana agar secepatnya bebas dari kategori salah satu Daerah tertinggal Di Sulawesi Tenggara.

Tim Aman Center, Ramadhan Ciptakan Politik Yang Dingin

Rumbia, SultraNET. | Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1439 H Tim Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman) Center akan tetap fokus melakukan kampanye namun semua itu disertai dengan agenda religi dengan cara mengajak dan menghimbau seluruh tim paslon untuk menghentikan fitnah fitnah politik.

Direktur Aman Center, Rahmat Apiti mengatakan, Jadikanlah bulan ramadhan ini sebagai politik jalan “suci” yakni ibadah ramadhan jangan dikotori dengan politik yang menghalalkan segala macam cara.

“Mengingat dibulan puasa merupakan momentum ibadah yang “sakral” dan sebaiknya kita hindari hujat menghujat kita ciptakan suasana politik yang cool.” Ujarnya

Mantan Aktivis itu juga menambahkan, Untuk Tim Aman pada bulan suci

ramadhan akan fokus pada agenda kultural sehingga ibadah dan agenda politik berjalan paralel karena bagi kami politik tidak boleh mencemari sakralitas bulan yang diagungkan umat muslim.

“Larangan dan atau himbauan bawaslu dalam bulan suci ramadhan kami sudah kaji dan kami akan patuhi dengan tidak akan mempolitisasi puasa untuk menjalankan misi politik Aman.” Jelasnya

Lebih lanjutnya, Pihaknya menyerukan dan menghimbau kepada seluruh Tim Pasangan Calon (Paslon) untuk tetap menciptakan suasana politik yang kondusif menjelang bulan suci ramadhan.

“Kami seluruh tim internal Aman terutama tim medsos yang terdata agar menciptakan opini opini yang sehat pada bulan ramadhan.” Pungkasnya (EM)

BKPRMI Wundulako Gelar Training Protokol / MC

Kolak, SultraNET. | Antusias masyarakat Kabupaten Kolaka dalam menyambut bulan suci ramadhan nampak mulai terasa, berbagai kegiatan sosial dan keagamaan mulai digalakkan salah satunya kegiatan training protokol atau MC remaja masjid se Kecamatan Pomalaa, Baula dan Wundulako.

Kegiatan yang digelar di Masjid Nurul Iman Pomalaa (12/5/2018) itu berlangsung atas kerjasama Dewan Perwakilan Kecamatan BKPRMI Wundulako dengan Remaja Masjid Nurul Iman Pomalaa (RINILA) dan di Sponsori oleh PT Antam, Tbk.

Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Wundulako Firlan Muharram Alimsyah, S. Pd menuturkan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat

membentuk pemuda islam yang menjadi penggerak dan inisiator dakwah yang berkelanjutan khususnya di Kecamatan Pomalaa, Baula dan Wundulako .

Selain itu sebagai moment melatih agar menjadi protokoler dalam membawakan acara pengisian shalat tarawih di bulan Suci Ramadhan.

“Insyallah dalam beberapa hari lagi kita memasuki bulan yang penuh berkah bulan suci ramadhan dan kegiatan ini bisa melahirkan remaja remaja yang siap menjadi protokol dan MC” Tutar Firlan

Dalam kegiatan itu disuguhkan tiga materi yakni materi Pemimpin idola, yang dibawakan langsung oleh ketua DPK BKPRMI wundulako Firlan Muharram Alimsyah, S. Pd.

Materi kedua Pemuda yang dirindukan sorga oleh ustadz Syaifuddin Mustaming, S. Ag sebagai Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Kolaka

Sedangkan Materi ketiga Menjadi protokol dan MC yang handal, oleh Muh. Asri, S. Pd selaku Protokoler dan Humas Universitas 19 November kolaka.

Warga Kecamatan Talaga Raya Di Hantui “Pagere-Gere”

Rumbia, SultraNET. | Warga Kecamatan Talaga Raya Dasa Talaga Besar Kabupaten Buton Tengah sedang menghadapi keresahan dengan adanya isu “Pagere-Gere”.

Pagere-gere adalah sebutan untuk penyerangan masyarakat indonesia pada zaman penjajajan. Motif perilaku Pagere-gere dengan cara membunuh dan memutilasi warga.

Namun, motif Pagere-gere yang tengah menghantui warga sekitar berupa menakut-nakuti warga lalu mencuri perabot rumah tangga ketika pemilik rumah lengah dan lari ketakutan.

Menurut salah satu warga Desa Talaga Besar, Darmanto membeberkan bahwa sudah sepekan warga dihantui dan ditakut-takuti bahkan keluarganya pun sudah menjadi korban.

“Sudah satu minggu ini warga di hantui orang tak dikenal, dan warga kampung mengisukan dengan pagere-gere, bahkan tanteku sendiri sudah jadi korbannya”, jelas Darmanto saat dihubungi oleh awak media harapansultra.com via handphone.

Ketua Pemuda Talaga Besar, Darmanto menambahkan bahwa motif pelakukanya berbeda dari sebutan Pegere-gere biasa, hal ini dikarenakan motifnya bukan membunuh tapi menakuti warga agar lari dari rumahnya, setelah kosong si pelaku langsung beraksi mengambil isi rumah, seperti beras, gula, kopi, hp, pakaian, dan perabot rumah lainnya yang berharga.

“Pegere-gere zaman Now aneh-aneh, pada malam hari warga ditakuti dan setelah lari segala isi rumah dicuri seperti beras, gula, kopi, hp, TV dan banyak lagi yang hilang”, tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Darmanto menyampaikan bahwa Sudah beberapa malam warga melakukan pengejaran dan hampir tertangkap warga.

Kasus pagere-gere ini belum dikonformasikan kepada pihak Babinsa dan Kepolisian karena masih akan diterapkan hukum adat.

Perang Tagar Dan Masa Depan

Demokrasi Kita

Perang Tagar Dan Masa Depan Demokrasi Kita

Oleh : Asbar

Sejak Politisi PKS Mardani Ali Sera melakukan kritik terhadap sejumlah persoalan di Indonesia, dibeberapa kesempatan melalui talks show dimedia televisi, sosok politisi yang selalu berapi-api ketika berbicara diforum itu juga melakukan aksi protes melalui social media Twitter terhadap pemerintahan Joko widodo, namun yang menjadi menarik dari kritik Pak Mardani di social media adalah tentang Hastag/tagar bertuliskan #2019GantiPresiden.

Fenomena Hastag/Tagar tentang #2019GantiPresiden ini mendapatkan respon yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Tak ayal, tidak berlangsung lama tulisan tagar ditwitter tersebut langsung menjadi fenomena social di Indonesia, bagaimana tidak, tagar tersebut dicetak dalam banyak ragam, misalnya dibaju kaos, gelas,dll.Namun yang sangat diminati jika kita melihat adalah baju bertuliskan #2019GantiPresiden ramai dipasaran, bahkan ada pedagang yang menjajakan kaos bertuliskan ganti presiden tersebut di kawasan car free day.

Animo masyarakat diseluruh saentero Indonesia terhadap baju kaos bertuliskan #2019Gantipresiden semakin menunjukan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam Indonesia kita. Beberapa persoalan hingga baju kaos tersebut menjadi diminati, *pertama* ; banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, baik itu kebijakan politik, hingga ekonomihingga hukum.Ini dapat dilihat berupa kebijakan ekonomi terhadap impor garam, beras dan bawang. *Kedua* ; membludaknya pekerja asing di Indonesia ditengah susahny mencari pekerjaan di Indonesia dan membludaknya angka pengangguran kita. *Ketiga* ; ketidakberpihakannya Joko Widodo terhadap kasus hokum Novel baswedan. Kendati presiden telah membuat statement bahwa polri telah bekerja dan menunggu hasilnya namun hingga satu tahun berjalan, kasus novel baswedan sampai hari ini stagnan tanpa ada perkembangan.

Setelah hastag tersebut, muncullah tagar tandingan dari kelompok pendukung

pemerintah, dengan bermodal tagar #Jokowi2Periode, namun sejauh ini, tagar kelompok pendukung joko widodo tidaklah mendapat respon yang besar, hanya beberapa kelompok saja.

Perang Tagar

Perang tagar antar pendukung Pemerintahan dan kelompok Oposisi bergitu sangat terasa dipermukaan. Bahkan beberapa kesempatan terjadi cekcok antara pendukung pemerintah dan oposisi. Misalnya beberapa kesempatan pendukung tagar #2019GantiPresiden dan #Jkw2periode di kawasan Car Free Day, Jakarta.

Namun yang menarik akhir-akhir ini adalah pelarangan pada kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Pelarangan tersebut terjadi di Medan, melalui instruksi Walikota Medan, agar menghimbau kepada polisi pamong praja (pol pp) agar melarang pengguna baju kaos memasuki area car free day, jalan merdeka. Surat edaran bernomor 300/4707 tertanggal 4 mei 2018.

Aksi pelarangan terhadap pengguna baju berhashtag #2019GantiPresiden juga terjadi di Surabaya dan terakhir diujung pantai losari, jl. Penghibur, Makassar pada minggu 6, Mei 2018. Terjadi adu mulut antara pihak kepolisian dengan pihak pendukung #2019GantiPresiden. Namun masih dapat dinetralisir kedua belah pihak.

Masa Depan Demokrasi Kita

demokrasi berasal dari dua kata, *Demos* artinya rakyat sedangkan *kratos/cratein* pemerintahan. Jadi jika disimpulkan secara epistemology adalah pemerintahan atas nama rakyat. Artinya pemimpin dipilih oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentingan rakyat.

Jadi jika dilihat secara menyrluruh, Kaos bertuliskan 2019 ganti presiden merupakan hal Yang biasa, Dan sebenarnya tidak perlu terlu terlalu responsible bahkan sampai Harus bersikap refresif terhadap rakyat.

Deklarasi #2019GantiPresiden bertepat dipintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Deklarasi tersebut dipimpin oleh politisi PAN Mardani Ali Sera, dan disaksikan relawan 2019 ganti presiden. Tidak dari lokasi tersebut juga ada aksi senam bersama pendukung Joko Widodo 2 Periode.

Terjadinya insiden pelarangan pemakaian baju kaos bertuliskan

#2019GantiPresiden oleh aparat kepolisian yang notabene adalah alat pemerintah semakin menunjukkan ketakmatangan atau bahkan memang pemerintah tidak memahami arti demokrasi sesungguhnya. Hal demikian menunjukkan tidak demokrasinya kita di Indonesia.

Di Indonesia hak berpendapat dan berserikat itu dijamin dalam UUD 1945, Pada Pasal 28 E, Ayat (3) berbunyi “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat”. Pasal ini sepertinya tidak dipahami oleh pemerintahan hari ini dalam melihat fenomena yang berkembang.

Saya sepakat, jika pelarangan terhadap kegiatan yang akan menceraikan beraikan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia, namun juga harus didasarkan dengan fakta-fakta bukan atas dasar kemauan satu kelompok sajakap egoisme individual saja. Baju bertagar #2019GantiPresiden tidak Harus dilarang Karena Hal tersebar dijamin oleh undang-undang dasar tahun 1945, Dan jika Hal tersebar Masih dilanjutkan maka ituSama saja melanggar hak kita demokrasi dan akan mematikan demokrasi kita jika tetap diteruskan oleh rezim hari ini.

jika pemerintah mau melawan hal tersebut,harusnya dengan sikap demokratik dan menyampaikan fakta-fakta yang kredibel kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menilai sendiri dan menentukan siapa kelak yang pantas memimpin Indonesia.

Jika kita melihat fenomena perang tagar di Indonesia, ada harapan demokrasi kita akan semakin menunjukkan kematangan. Jika kedua kelompok sama-sama memberikan argumentasi dengan sadar dan penuh data-data yang valid. Namun memberikan dan membiarkan intimidasi pada satu kelompok tagar itu jelas melanggar hak demokrasi di Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Penulis : ASBAR PRANDY

(Mahasiswa Universitas Fajar Makassar Asal Sultra)

LKPD Sultra : Masyarakat Kabaena Berharap MV. Cantika Beroperasi Di Pelabuhan Sikeli Sesuai Jadwal Semula

Rumbia, SultraNET. | Kebutuhan masyarakat Kabaena terhadap Transportasi laut yang menjadi akses utama masyarakat pulau itu mendapat angin segar dengan masuknya rute persinggahan MV. Cantika Anugrah, namun setelah terjadi gesekan yang diduga dilatari persaingan bisnis, terjadi kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Bombana, Dinas Perhubungan Kab. Bombana dan pihak pemilik Usaha Jasa transportasi Kapal Kayu dan MV. Cantika rute Kasipute - Kabaena.

Hasil kesepakatan besama itu melahirkan kesepakatan yaitu MV. Cantika Anugrah yang berdasarkan Surat Izin seyogyanya berlabuh di Pelabuhan Sikeli sesuai jadwal, diharuskan membagi jadwalnya dan hanya boleh berlabuh di pelabuhan sikeli sekali dalam seminggu dan jadwal lainnya di alihkan ke pelabuhan Batuawu.

Kesepakatan itu rupanya melahirkan banyak keluhan dari masyarakat, hal itu diungkapkan Hir Abrianto pengurus Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Riset dan Advokasi.

“Dengan ditetapkannya aturan berlabuhnya MV. Cantika Anugrah yang sehari di pelabuhan Batuawu dan sehari lagi di pelabuhan Sikeli justru membingungkan warga”, ungkap Hir Abrianto.

Menurutnya, Masyarakat Kabaena hari ini sangat membutuhkan Transportasi MV. Cantika Anugrah beroperasi kembali di pelabuhan Sikeli sesuai jadwal semula karena lebih terjangkau.

Disisi lain lanjutnya, dari segi keamanan dan kenyamanan penumpang pelabuhan Batuawu dinilai masih jauh dari kata layak guna.

“Dengan kondisi pelabuhan Batuawu yang sangat tidak layak dijadikan

jalur transportasi umum, lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan”, Tambahnya.

Menurutnya, pelabuhan sikeli adalah pelabuhan paling layak digunakan sebagai tempat berlabuh Kapal Berstandar Nasional seperti MV. Cantika, karena telah berstandar nasional, apalagi pelabuhan tersebut dibangun langsung oleh Kementrian Perhubungan Laut.

Mewakili perasaan dan harapan masyarakat Kabaena pengguna jasa transportasi laut LKPD Sultra meminta kepada Dirjen Perhubungan Bidang kelautan dan Kemaritiman Republik Indonesia agar membentuk Regulasi aturan yang Kuat dan pasti karena aturan yang tertuang dalam surat izin berlabuh yang diterbitkan sebelumnya tidak dipatuhi bahkan ditolak oleh pihak pemilik usaha jasa laut lainnya.

Lebih lagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bombana tidak memperhatikan bahkan membiarkan ketetapan sebelumnya ditolak hingga berujung pada pengusiran kapal yang akan berlabuh.